

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan

Samudera Nizam Zachman Jakarta

Dasar Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Hukum didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
Entitas dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi
Rencana dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Strategis Perikanan nomor : 20/PERMEN-KP/2014, berkedudukan di Jalan Tuna
Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Penjaringan – Jakarta Utara.

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;

- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penertiban Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

(1) Pendapatan- LRA

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta* telah melakukan revisi ke 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran, pembukaan blokir anggaran dan penyesuaian halaman III DIPA serta penambahan pagu atas kelebihan target PNBPN. Perubahan tersebut membuat sebagian akun pagu menjadi bertambah dan ada yang berkurang dikarenakan blokir pagu. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	1.600.000	1.600.000
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	24.845.024.000	24.845.024.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	-
Jumlah Pendapatan	24.846.624.000	24.846.624.000
Belanja		
Belanja Pegawai	9.161.713.000	10.921.105.000
Belanja Barang	24.515.241.000	26.007.613.000
Belanja Modal	8.174.052.000	7.760.854.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	41.851.006.000	44.689.572.000

Realisasi

Pendapatan

Rp39.790.941.114

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.790.941.114 atau mencapai 160,15 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp24.846.624.000. Pendapatan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta terdiri dari Pendapatan Jasa, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	3.075.887	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	18.035	-
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	1.600.000	306.404.288	19.150,27
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	24.845.024.000	39.348.917.406	158,38
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	981.685	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	30.000.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	64.708.813	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	36.835.000	-
Jumlah	24.846.624.000	39.790.941.114	160,15

Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 lebih rendah 2,13% dibandingkan TA 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat tambahan pendapatan di luar pendapatan reguler yaitu pembayaran penyelesaian tindak lanjut BPK yang menambah realisasi PNBP tahun 2023 dan hanya ada sedikit kapal yang keluar kolam di tahun 2024 dengan tarif progresif dibandingkan dengan tahun 2023.

Pendapatan PNBP terbesar yang diterima oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar 31 Miliar Rupiah yang merupakan Akun PNBP yang terdiri atas beberapa jasa seperti jasa pas masuk, jasa tambat labuh, jasa kebersihan kolam, jasa kebersihan Kawasan dan jasa listrik.

Penerimaan kembali belanja pegawai dan barang TAYL merupakan penerimaan yang berasal dari potongan SPM dari kekurangan gaji TAYL atau setoran kelebihan belanja TAYL.

Pendapatan Anggaran lain-lain adalah setoran pengembalian ke kas negara atas temuan itjen yang sudah diselesaikan pada April 2024.

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dan pemindahtanganan BMN lainnya merupakan hasil penerimaan atas lelang BMN yang dilakukan oleh PPS Nizam Zachman Jakarta bersama dengan KPKNL Jakarta II.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp981.685 berasal dari tiga pekerjaan pada SP2D nomor 241751301025042 tanggal 09 Juli 2024, 241751301031864 tanggal 08 Agustus 2024, 241751301035982 tanggal 02 September 2024 dan 241751303042747 tanggal 1 Oktober 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	64.708.813	10.077.777	542,09
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	36.835.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai dengan tusi	306.404.288	441.209.430	-30,55
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	39.348.917.406	40.004.119.968	-1,64
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	981.685	370.203	165,17
Pendapatan Denda Lainnya	-	615.145	-100,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.000.000	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	3.075.887	25.680.686	-88,02
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	18.035	176.824.937	-99,99
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	39.339.231	-100,00
Jumlah	39.790.941.114	40.658.898.146	-2,13

Realisasi Belanja B.2 Belanja

Negara

Rp41.850.417.937

Realisasi Belanja instansi pada Periode TA 2024 (Unaudited) adalah sebesar Rp41.850.417.937 atau 93,65% dari anggaran belanja sebesar Rp44.689.572.000. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp10.906.539.404 atau 99,87% dari pagu anggaran sebesar Rp10.921.105.000, Belanja Barang sebesar Rp23.635.189.886 atau 90,88% dari pagu anggaran sebesar Rp26.007.613.000 dan Belanja Modal sebesar Rp7.308.688.647 atau 94,17% dari pagu anggaran Rp7.760.854.000. Total Realisasi Belanja Kotor sebesar Rp41.872.088.131 atau 93,70% adapun pengembalian belanja sebesar Rp21.670.194, jadi Total Realisasi Belanja bersih sebesar Rp41.850.417.937.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10.921.105.000	10.914.291.883	99,94
Belanja Barang	26.007.613.000	23.649.107.601	90,93
Belanja Modal	7.760.854.000	7.308.688.647	94,17
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	44.689.572.000	41.872.088.131	93,70
Pengembalian		(21.670.194)	
Jumlah	44.689.572.000	41.850.417.937	93,65

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.914.291.883	8.763.592.772	24,54
Belanja Barang	23.649.107.601	26.743.922.976	(11,57)
Belanja Modal	7.308.688.647	5.132.866.889	42,39
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Kotor	41.872.088.131	40.640.382.637	3,03
Pengembalian Belanja	21.670.194	71.470.218	(69,68)
Jumlah Bersih	41.850.417.937	40.568.912.419	3,16

Belanja Pegawai
Rp10.906.539.404

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.906.539.404 dan Rp8.763.592.772. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK	5.541.097.566	4.538.884.372	22,08
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Tunjangan Khusus	5.108.623.317	4.102.559.500	24,52
Belanja Lembur	264.571.000	122.148.900	-
Belanja Vaksinasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10.914.291.883	7.241.041.569	50,73
Pengembalian Belanja Pegawai	(7.752.479)	(2.545.650)	
Jumlah Belanja	10.906.539.404	7.235.318.454	50,74

Belanja Barang
Rp23.635.189.886

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.635.189.886 dan Rp26.743.922.976. Realisasi Belanja Barang TA 2024 lebih kecil 11,40% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

*Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan
2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8.547.927.276	8.449.505.758	1,16
Belanja Barang Non Operasional	1.008.457.719	1.059.538.161	(4,82)
Belanja Jasa	8.040.809.038	10.386.051.828	(22,58)
Belanja Persediaan	479.133.438	521.571.340	(8,14)
Belanja Pemeliharaan	4.139.669.080	4.210.963.387	(1,69)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.433.111.050	2.116.292.502	(32,28)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	23.649.107.601	26.743.922.976	(11,57)
Pengembalian Belanja	(13.917.715)	(68.924.568)	
Jumlah Belanja	23.635.189.886	26.674.998.408	(11,40)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp7.308.688.647

Realisasi Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.308.688.647 dan Rp5.132.866.889. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dibandingkan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 42,39% disebabkan karena terdapat pekerjaan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan Terpadu (Command Center) serta pembelian alat berat (bachoe loader) dan dump truck.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024
dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.902.147.391	4.745.187.296	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.406.541.256	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	305.317.593	-
Belanja Modal Lainnya	0	82.362.000	-
Jumlah Belanja Kotor	7.308.688.647	5.132.866.889	-
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	7.308.688.647	5.132.866.889	42,39

Adapun rincian penambahan belanja modal adalah sebagai berikut :

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan maupun pengurangan tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp5.902.147.391, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.745.187.296. Hal ini disebabkan terdapat pekerjaan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan Terpadu (Command Center) serta pembelian alat berat (bachoe loader) dan dump truck.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Loader	1.276.500.000	-	#DIV/0!
Kapal Tarik	189.000.000	-	#DIV/0!
Pompa	579.975.000	-	#DIV/0!
Kendaraan Bermotor Khusus	560.000.000	-	#DIV/0!
Perkakas Bengkel Kayu	8.650.000	-	#DIV/0!
Peralatan Bengkel Khusus Peladam	4.440.000	-	#DIV/0!
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	111.010.000	-	#DIV/0!
Alat Kantor Lainnya	125.000.000	-	#DIV/0!
Meubelair	284.579.850	-	#DIV/0!
Alat Pendingin	208.760.000	-	#DIV/0!
Alat Dapur	1.770.000	-	#DIV/0!
Alat Rumah Tanggal Lainnya (Home Use)	429.342.514	-	#DIV/0!
Alat Rumah Tanggal Lainnya	34.513.000	-	#DIV/0!
Peralatan Studio, Video dan Film	44.981.450	-	#DIV/0!
Peralatan Studio Pemetaan	9.500.000	-	#DIV/0!
Alat Komunikasi Telephone	8.880.000	-	#DIV/0!
Alat Komunikasi Khusus	6.000.000	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium Pendidikan	198.310.000	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium Teknik Pantai	115.533.051	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium Penunjang	9.850.000	-	#DIV/0!
Personal Komputer	335.500.000	-	#DIV/0!
Peralatan Komputer Lainnya	1.270.000.000	-	#DIV/0!
Rambu Tidak Bersuar	90.052.526	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	5.902.147.391	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.406.541.256 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 tidak terdapat perbedaan dibandingkan Realisasi TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Bangunan Gedung Kantor	798.802.180	0	#DIV/0!
Bangunan Industri	369.903.376	0	#DIV/0!
Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	46.701.700	0	#DIV/0!
Bangunan Menara Pengawas	191.134.000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.406.541.256	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belum ada belanja modal Jalan, Irigasi dan Jembatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2024.

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Jalan Khusus Kompleks	-	-	
Jalan Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp82.362.000. Belum ada belanja modal lainnya yang dilakukan pada tahun anggaran 2024.

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial

Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada TA 2024 tidak terdapat perubahan dibandingkan TA 2023 karena tidak ada alokasi anggaran pada pos ini.